

TAJUK RENCANA

Melaksanakan PTKM Mikro

KEBIJAKAN pengendalian pandemi Covid-19, masuk babak lebih rinci. Pembatasan Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM), setelah hampir satu bulan dilaksanakan se Jawa Bali, kini kebijakan berlanjut dengan PTKM berskala mikro. Pembatasan tersebut diterapkan selama 14 hari mulai 9-22 Februari 2021. DIY juga memberlakukan kebijakan tersebut.

Meski sebenarnya, kebijakan yang mirip hal tersebut pernah dilaksanakan saat pertama Covid-19 merebak, namun lebih bersifat internal dan improvisasi. Di DIY, beberapa desa melakukan yang pada hakikatnya hampir sama dengan PTKM berskala mikro. Hanya memang dalam program kebijakan kali ini, ada aturan yang jelas serta prosedur yang sudah ditata.

Namun, penonjolan peranan seluruh komponen desa/RT/RW Dusun adalah menggiatkan seluruhnya dengan membentuk Posko. Menurut jurubicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito Posko yang ada di kalurahan tersebut, bisa berfungsi sebagai pusat kegiatan sosialisasi protokol kesehatan yang sekarang menjadi 5 M. Yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Posko juga berlaku dalam menanggapi kesehatan, mulai dari tracing, treatment, karantina, vaksinasi, ekonomi, dan sosial. Posko tingkat desa tersebut, sangat berperanan dalam penegakan disiplin masyarakat. Selain juga dilengkapi dengan data zonasi kampung, perlengkapan prokes dan pelaksanaan sanksi.

Karena Posko yang memadai, tentu memerlukan dana. Untuk menanggung semuanya, Mendagri mengeluarkan instruksi, bahwa semua kebutuhan pelaksanaan dibayai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa. Sedangkan kebutuhan tingkat kalurahan ditanggung

APBD kabupaten/kota.

Lalu siapakah yang ditunjuk menangani masalah-masalah, menurut Mendagri, bisa saja melibatkan personel-personel posko melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), tokoh masyarakat, agama, adat, pemuda, penyuluh, pendamping, tenaga kesehatan, relawan, PKK, hingga Karang Taruna.

Selama sebelas bulan Indonesia masuk dalam masa pandemi, berbagai kebijakan sudah dibuat. Media massa serta petugas sudah tak kurang-kurang mengkampanyekan protokol kesehatan. Namun tetap saja angka yang terpapar bertambah. Karena itulah, PPKM berskala mikro kali ini lebih menitik, membuka ruang bagi daerah untuk membuat kebijakan yang lebih mengarah pada kearifan lokal masing-masing daerah. PPKM yang seri 1 dan 2 yang dikatakan oleh Presiden Jokowi belum efektif, meski sebenarnya sejumlah daerah ada yang turun angka terpapar, namun dianggap tak signifikan.

DIY sebenarnya pernah melaksanakan PPKM mikro saat Covid-19 berjangkit beberapa bulan. Waktu itu memang efektif. Tetapi perjalanan waktu, jumlah yang terpapar di DIY malah melaju tak terkendali. Kini kebijakan PPKM skala mikro mungkin bisa berdampak signifikan?. Semua bergantung bagaimana implementasi dan kesadaran masing-masing daerah, tiap-tiap desa/RT untuk melaksanakan lebih disiplin. Dukungan Gubernur, Bupati atau walikota untuk selalu mengevaluasi dan mengontrol pelaksanaan akan sangat mempengaruhi hasilnya. Kita berharap PPKM bisa ditindak lanjuti tiap aparat desa. Sultan HB X mengingatkan 'Jaga Warga', bisa menjaga warga agar tetap konsisten, menjaga dan mengingatkan bahayanya pandemi. (****)

Bencana Kodrat Alam

Ki Cahyono Agus

lombang pasang, gempa bumi dan karhutla. Dampak bencana alam sudah melanda 191 korban meninggal dunia dan 9 orang hilang, dengan korban terbanyak terjadi pada bencana gempa bumi dan longsor.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan 7 faktor pemicu cuaca ekstrim berisiko bencana



berapi sebagai bagian cincin gunung api bumi, mengakibatkan tanahnya subur makmur. Namun bencana gempa vulkanik juga telah terbukti mengubur peradaban Nusantara. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan bahwa saat ini terdapat 10 gunung api di Indonesia yang mengalami peningkatan aktivitas vulkanik. Potensi tsunami vulkanik telah dan dapat terjadi akibat erupsi gunung berapi dan kejadian yang menyertainya seperti awan panas yang memasuki air, letusan dan longsor bawah laut. Runtuhnya kaldera, longsor lereng gunung ke wilayah perairan, atau kejadian ikutan terkait aktivitas vulkanik lainnya.

Pusat Gempa Nasional mencatat terdapat garis sesar sebanyak 295 titik yang berpotensi kebencanaan. BMKG mencatat peningkatan aktivitas gempa vulkanik dan tektonik di Indonesia. Setidaknya tercatat 59 kali gempa yang dirasakan masyarakat. Daerah pegunungan dan perbukitan berpotensi bencana longoran, sedangkan wilayah pesisir pantai berpotensi terjadi tsunami.

Kita perlu mengupayakan kembali harmonisasi dan *manunggaling kawula-Gusti* dan alam semesta. Untuk mendukung jagad biru rahayu sesuai kodrat alam seutuhnya. □

***Prof Dr Ki Cahyono Agus, Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM, Ketua Umum Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS).**

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

KODRAT limpahan kekayaan sumber daya alam Indonesia adalah anugerah dan berkah terbesar. Sekarang telah berubah, menjadi sumber musibah. Semua terjadi karena anugerah alam telah dieksploitasi secara berlebihan dan salah kelola. Kekayaan alam yang seharusnya baru habis sampai tujuh turunan, ternyata telah habis dan menyisakan petaka sejak turunan pertama. Manusia telah gagal sebagai khalifah di bumi. Eksploitasi yang melebihi daya dukung bumi, telah menyebabkan percepatan dan penguatan antropogenik terhadap bencana alam menjadi semakin tragis.

Booming sumber daya hutan tropika basah, tambang minyak, batubara, emas, timah, pernah berperan penting menjadi *saka guru* perekonomian Bangsa Indonesia. Tragis! Sekarang justru menyisakan beban dan menstimulasi bencana kerusakan ekonomi, lingkungan, sosial-budaya dan kemanusiaan yang tragis.

Paru-paru Dunia

Indonesia berada pada wilayah tropika, cincin gunung berapi bumi, pertemuan 3 patahan bumi yang besar. Hutan tropika basah kita yang tadinya mampu berfungsi menjadi paru-paru dunia, sekarang telah menjadi sebagai negara pengemisi karbon terbesar kedua di dunia serta berkontribusi besar terhadap pemanasan global. Instalasi air raksasa bumi yang dipikirkan perakaran hutan tropika telah musnah, saluran air sungai juga tersumbat. Penyediaan air dan oksigen untuk kehidupan telah terganggu secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat setidaknya terdapat 263 kasus bencana yang terjadi sepanjang Januari 2021. Dengan 98% disebabkan faktor hidrometeorologi basah dan didominasi bencana banjir dan tanah longsor Bencana banjir 167 kejadian, tanah longsor 42 kejadian, dan puting beliung 42 kejadian. Di samping adanya ge-

di wilayah Indonesia. Pertama, fenomena Monsoon Asia yang memperlihatkan anomali adanya penguatan curah hujan tinggi. Kedua, faktor lingkungan berupa peningkatan trend curah hujan ekstrim dan dampak perubahan iklim. Ketiga, fenomena La-Nina moderat hingga Juni 2021.

Keempat, dinamika atmosfer yang tidak stabil. Kelima, adanya sirkulasi siklonik yang membentuk daerah pertemuan angin (konfluensi). Keenam, adanya daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin (konvergensi) lainnya. Ketujuh, adanya labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal di sejumlah wilayah Indonesia.

Mengubur Peradaban

Indonesia diliputi deretan 129 gunung

Mengawal Musrenbang, Memahami Kebutuhan Warga

RANGKAIAN pelaksanaan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menentukan skala prioritas pembangunan 2022 sedang berjalan di seluruh wilayah Indonesia. Di DIY, tahapannya di tingkat kalurahan rata-rata sudah berakhir dan kini sedang berlanjut proses berikutnya yaitu musrenbang di tingkat kapanewon.

Musrenbang adalah satu metode *bottom-up* yang dimiliki Indonesia. Keberadaan Musrenbang secara resmi dalam proses perencanaan adalah satu kesempatan untuk benar-benar menerapkan prinsip pendekatan *bottom-up* ini. Jika dikaitkan dengan proses penganggaran, Musrenbang merupakan salah satu tahapan di mana kebutuhan masyarakat bisa diidentifikasi dan dianggarkan.

Identifikasi kebutuhan masyarakat dalam penganggaran adalah bentuk nyata dari *political will* pemerintah. Merupakan manifestasi kepedulian pemerintah terhadap sebuah masalah yang ada di masyarakat dan upaya untuk menyelesaikannya. Hal ini karena, keinginan baik dari pemerintah saja tidak akan cukup tanpa adanya dukungan anggaran. Tanpa dukungan anggaran, janji-janji politik pemerintah hanya akan menjadi wacana tanpa ada kepastian dalam pelaksanaannya. Karenanya menjadi sangat penting bisa menjamin bahwa janji-janji itu teridentifikasi dalam anggaran. Musrenbang adalah media penting untuk melakukan hal tersebut.

Sangat Penting

Inilah penjelasan mengapa forum Musrenbang itu menjadi sangat penting untuk bisa menjawab permasalahan di masyarakat. Forum ini diharapkan akan mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada dan kebutuhan-kebutuhan apa yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Skala prioritas yang disusun dalam forum ini seharusnya merupakan cermin seluruh kebutuhan masyarakat, bukan hanya mem-

Ane Permatasari

otret secara parsial kebutuhan tersebut.

Permasalahan inilah yang sering muncul dalam proses Musrenbang. Potret kebutuhan yang mampu dibingkai melalui kegiatan ini biasanya hanyalah permasalahan-permasalahan fisik yang solusinya biasanya merupakan pembangunan infrastruktur kasat mata. Sedangkan permasalahan-permasalahan yang bersifat non-fisik sering luput dari perhatian. Kalau pun di masa pandemi ini pemberdayaan masyarakat menjadi isu sexy yang mulai mendapat perhatian, di banyak wilayah mayoritas didominasi isu pemberdayaan UMKM. Sektor ini memang terbukti menjadi *epenyelamat* ekonomi produktif. Karena telah membuktikan diri mampu bertahan di tengah gelombang deras pandemi yang meluluhlantahkan begitu banyak kegiatan ekonomi produktif. Sedangkan masalah perlindungan perempuan dan anak, pelayanan kelompok difabel, sering tidak mendapatkan perhatian.

Permasalahan lain adalah forum musrenbang sering belum mampu menghadirkan semua unsur masyarakat, misalnya perempuan, anak dan kelompok difabel. Sering mereka tidak diundang. Kadang mereka diundang, tapi karena waktu pelaksanaan musrenbang di desa biasanya malam hari, menjadi kendala tersendiri bagi mereka untuk hadir. Terakhir adalah fenomena bahwa mereka diundang, bisa hadir dan diberi kesempatan bicara, tetapi ketika bicara, yang dilakukan malah curhat berbagai masalah yang dihadapi, tanpa menyampaikanakan data sama sekali.

Kelemahan

Di sinilah kelemahan yang sering dimiliki kelompok ini. Berkeluh kesah memang perlu de-

ngan harapan bisa menumbuhkan empati pihak lain yang mendengarkan. Tetapi membuat sebuah permasalahan menjadi sebuah mata anggaran yang dianggarkan, harus didukung data yang menunjukkan, penyelesaian masalah itu membutuhkan dana dan perlu dibayai melalui APBDes atau APBD. Di sinilah para perempuan, kelompok difabel dan para pemerhati masalah anak, harus lebih mempersiapkan diri dengan data ketika menyampaikan permasalahan dan kebutuhan mereka di dalam musrenbang.

Kegiatan musrenbang tingkat kapanewon masih berproses di tahap revisi susunan daftar prioritas yang akan dibayai tahun 2022 sebelum pelaksanaan musrenbang tingkat kabupaten. Masih ada waktu untuk mencermati lagi draft susunan prioritas tersebut untuk bisa menjamin bahwa kepentingan dan kebutuhan seluruh masyarakat akan terakomodir optimal. Mari kita kawal proses musrenbang. Sehingga mampu memberikan hasil terbaik baik seluruh rakyat. □

***Dr Ane Permatasari MA, Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY.**

Pojok KR

DIY Berlakukan PTKM Mikro.
-- Akan percuma, jika tidak disiplin melakukan prokes.

DIY masuk puncak musim hujan.
-- Ingat hujan, ingat banjir, ingat ancaman Demam Berdarah.

Pertama kali Hari Pers Nasional dilaksanakan secara daring.
-- Tidak mematahkan semangat Pers melawan Covid-19.

Beraksi

PIKIRAN PEMBACA
Naskah bisa dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/Scan KTP
atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55232.
Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks.
Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Pembelajaran Berbasis Individu

KEGIATAN belajar mengajar masih menerapkan model pembelajaran daring (dalam jaringan). Setelah berjalan lebih dari sepuluh bulan, sudah melewati dua kali evaluasi ketercapaian pembelajaran yaitu Penilaian Akhir Tahun (Juni) dan Penilaian Akhir Semester (Desember).

Dari hasil evaluasi tersebut, guru pun menemukan perbedaan pada siswanya. Contohnya, perbedaan dalam hal perkembangan akademik, sikap, dan keterampilan. Ada beberapa siswa yang masuk kategori melejit, ada pula siswa yang termasuk kategori belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KK). Bahkan tidak jarang guru menemukan beberapa kondisi siswa di luar keseharian. Ketika kondisi normal prestasinya sedang-sedang, justru selama pembelajaran model daring prestasinya sangat melejit. Sebaliknya, saat kondisi normal sangat bagus, di masa pandemi ini mengalami penurunan prestasi. Mengapa kondisi bisa demikian?

Sejatinya pembelajaran di masa pandemi ini berbasis individu. Kondisinya antara satu siswa dengan siswa lain tentu berbeda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan siswa selama pembelajaran daring ini. Pertama, peran orang tua, jika kondisi normal, setidaknya siswa belajar di sekolah sampai siang hari. Namun di masa pandemi ini siswa lebih banyak berinteraksi dengan orang tua. Hal tersebut otomatis peran orang tua bertambah yaitu menjadi guru bagi anak-anaknya. Jika orang tua pandai mengelola waktu antara bekerja dan mendampingi anaknya, maka prestasi anaknya pun bisa dikatakan mengalami peningkatan. Atas dasar kesungguhan orang tua dalam mendampingi anaknya selama pandemi ini, maka sangat tepat ketika di akhir semester orang tua mendapat penghargaan sebagai 'guru terbaik'.

Kedua, kondisi lingkungan sekitar rumah. Pernahkah ayah bunda saat sedang mendampingi anak belajar di rumah, kemudian terdengar suara dari luar memanggil-manggil anak kita untuk mengajak bermain? Jika disuruh memilih, pasti anak cenderung lebih memilih bermain. Jika anak dilarang ikut bermain, bisa jadi menimbulkan keributan. Namun kondisi tersebut bisa diantisipasi dengan mengisi waktu membentuk sebuah kelompok belajar di lingkungannya sekitar rumah. Saat kelompok belajar terbentuk, kombinasikan antara kegiatan belajar dengan selinggi permainan. Secara tidak langsung orang tua dapat mengarahkan anak dan teman-temannya melakukan kegiatan yang positif. Anak merasa senang bisa belajar dan bermain. Orang tua juga merasa nyaman tanpa keributan.

Ketiga, sarana belajar. Menurut KBBI, sarana memiliki arti segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan. Jika berbicara sarana pembelajaran di masa pandemi ini, tentu merujuk pada alat teknologi yaitu *smartphone*, *laptop* dan jaringan internet. Antara siswa satu dengan siswa yang lainnya memiliki sarana yang berbeda. Sebagai contoh siswa A memiliki *smartphone* dan rumahnya terpasang *wifi*. Sedangkan siswa B juga memiliki *smartphone* tetapi di tempat tinggalnya terkendala sinyal internet. Dari dua perbedaan ini tentu berdampak pada pencapaian hasil belajarnya.

Beberapa faktor di atas dapat mempengaruhi perkembangan siswa selama pandemi, namun satu hal yang perlu digarisbawahi yaitu setiap siswa memiliki kelebihan masing-masing. Tugas kita adalah bersama-sama melejitkan potensi anak demi menciptakan generasi emas.

Adib Muhammad SPd
Guru SDIT Ar Raihan, Bantul.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yurika Nugroho Samawi SE MM MSC. Direktur Produksi: Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Alamat Percepatan: Jalan Raya Yogyakarta - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsh, Kepala Biro : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.